Pemenuhan Hak Kesehatan bagi Wargabinaan di Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Muhammad Firman Ardiansyah^{*}, Chepi Ali Firman Zakaria

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*ardiansyahmfa@gmail.com, chepialifirmanzakaria@gmail.com

Abstract. In the process of enforcing the law for criminals to be integrated back in the community through the Penitentiary is a place to carry out the construction of Prisoners and Correctional Students. The manifestation of Article 12 of Law No.12 of 1995 on Correctional Services requires that every inmate get a decent place to live, the right to nutritious food and the right to health services. Terkait with health services in Law No. 12 of 1995 mentions that one of the rights of inmates is "to get health services and proper food". But in contrast to the conditions on the ground with the application of the law is difficult to implement. Departing from this, the question arises: How is the fulfillment of health rights for fostered citizens in The Class IIA Banceuy Bandung Correctional Institution based on Law No. 12 of 1995 on Correctional Services? What is the concept of good development of health rights to the built citizens in The Correctional Institution Class IIA Banceuy Bandung based on Law No. 12 of 1995 on Correctional Services? . Research on thesis writing uses empirical juridical methods with sampling techniques. The data collection techniques used include observations, interviews and documentation. The results of this study show that the fulfillment of the health rights of lapas residents Class II-A Banceuy Bandung can be said to be insufficient due to lack of medical personnel and or not in accordance with Permenkumham No.M.HH.02.UM.06.04 of 2011, and not in accordance with article 17 paragraph 4 of PP No. 32 of 1999 related to health care outside LAPAS. This requires that the government can be more careful in understanding the context of the laws and regulations and their derivative regulations at the level of implementation.

Keywords: *Fulfillment of Health Rights, Concept of Coaching, Health Service.*

Abstrak. Dalam proses menegakan hukum bagi pelaku kejahatan agar terintegrasi kembali dimasyarakat melalui Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat melaksanakan pembinaan Narapidana. Pasal 12 UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mewajibkan setiap narapidana mendapatkan tempat tinggal yang layak, hak untuk mendapatkan makanan yang bergizi juga hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan." Selanjutnya dengan pelayanan kesehatan didalam UU No. 12 Tahun 1995 menyebutkan bahwa salah satu hak narapidana ialah "mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak". Namun pada praktiknya penerapan undang-undang dirasa sulit dilaksanakan. Berangkat dari hal tersebut maka timbul pertanyaan: Bagaimana pemenuhan hak kesehatan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung dihubungkan UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan? Serta Bagaimana konsep pembinaan yang baik atas hak kesehatan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung dihubungkan UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan?. Penelitian pada penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dengan teknik sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak kesehatan wargabinaan LAPAS Kelas II-A Banceuy Bandung belum cukup memadai dikarenakan kurangnya tenaga medis dan atau tidak sesuai dengan Permenkumham No. M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011, dan tidak sesuai pasal 17 ayat 4 PP No. 32 Tahun 1999 terkait penanganan kesehatan diluar LAPAS. Hal ini mengharuskan pemerintah dapat lebih teliti melihat kondisi dilapangan.

Kata Kunci: *Pemenuhan Hak Kesehatan, Konsep Pembinaan, Pelayanan Kesehatan.*

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan Hukum segala bentuk perbuatan terdapat aturan dan peraturan yang mengatur kehidupan sosial masyarakat. Dimana hukum terbentuk atas dasar keberadaan masyarakat dan adanya wilayah Negara. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” hal ini tertuang pada Pasal 1 Ayat (3) UUD NKRI 1945. Indonesia sebagai negara hukum memiliki system yang berlaku dan ditetapkan secara legal oleh Lembaga berwenang, hal ini menjelaskan ketika suatu undang-undang di undangkan maka dengan demikian masyarakat dianggap mengetahui atas peraturan yang telah dikeluarkan sebagai acuan untuk mengatur kehidupan masyarakat sosial.

Fungsi dari hukum bukan hanya sebatas tulisan tanpa makna. Didalamnya mengandung suatu tujuan agar dengan adanya aturan tersebut stabilitas kehidupan terjamin dan perbuatan-perbuatan buruk manusia dapat berangsur membaik.(1) Hal itu mengartikan bahwa seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum (*rule of law*). Hukum dibuat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hukum tersebut itu bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian.(2)

Hukum sendiri secara global dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yakni perdata dan pidana, sedangkan fokus penulis dalam hal ini hanya menyangkut tentang hukum pidana. Hukum pidana sendiri mengatur terkait hal apa saja yang dilarang serta ancaman apa saja yang diberikan bagi setiap pelanggar. Hal ini bertujuan agar setiap hak warga Negara terjamin dan tentunya juga dapat melindungi diri dari perbuatan buruk orang lain. Apabila terdapat suatu pelanggaran tentunya juga terdapat ganjaran bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut berupa pertanggungjawaban pidana, baik dalam bentuk denda maupun hukuman penjara.(3)

Sejak tahun 1964 sistem kepenjaraan diubah menjadi sistem pemasyarakatan, Kemudian istilah penjara berganti dengan sebutan lembaga pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Tujuan dibentuknya Lapas adalah untuk menyiapkan warga binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.(4)

Lapas merupakan tempat yang semula pelaku kejahatan dibuat jera pada waktu dimasukkan penjara yaitu berupa siksaan, maupun lainnya, kini bergeser menjadi pembinaan hal itu disebabkan oleh perubahan nama menjadi lembaga pemasyarakatan terdapat suatu aturan yang berkaitan dengan arah dan bagaimana cara memperlakukan narapidana, baik meliputi pengayoman, pembinaan, pendidikan, intervensi, perubahan perilaku juga reintegrasi sehingga dengan adanya perlakuan tersebut kelak ketika narapidana kembali kepada lingkungan sosialnya mereka dapat menjadi pribadi yang lebih baik.(5) Seperti yang kita ketahui bersama landasan hukum Lapas terdapat di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan, Lapas itu merupakan tempat bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam menjalani hukuman dan atau masa binaan.

Meskipun narapidana adalah orang yang telah melakukan kejahatan tidak begitu saja kehilangan kemerdekaan atas kesalahan yang dilakukan karena perbuatan melawan hukum tersebut, namun masih terdapat hak-hak yang melekat pada dirinya selanjutnya terkait hak-haknya bagi narapidana didalam lembaga pemasyarakatan harus tetap dilindungi oleh Undang Undang, sehingga eksistensinya narapidana sebagai manusia ketika dimasukkan ke dalam penjara akan tetap ada.

Dalam hal ini, lembaga pemasyarakatan harus melindungi hak-hak terpidana, dan terpidana harus diperlakukan secara manusiawi mengikuti prinsip-prinsip yang secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.(6) tetapi menyangkut seluruh aspek kehidupan. Dalam UU No. 12 Tahun 1995 juga telah disebutkan bahwa salah satu hak narapidana ialah “mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak”. Adanya

hak kesehatan ini diharapkan dapat menunjang aktivitas yang dilakukan narapidana baik di LAPAS selama narapidana menjalani masa pidananya.

Warga binaan didalam LAPAS tidak semuanya dalam kondisi sehat, bagi warga dari negara kepada warganya. Pelayanan kesehatan yang baik bagi warga binaan yaitu terdiri dari tersediannya sarana dan prasarana kesehatan. Pelaksanaan hak pelayanan kesehatan kepada wargabinaan dilakukan sesuai dengan tinjauan undang-undang. Namun ini masih dianggap sulit, karena kondisi yang diharapkan dalam undang-undang dirasa sulit untuk diterapkan ketika dilaksanakan apabila melihat kondisi lapangan LAPAS pada realitanya. Hal yang terjadi sebaliknya, kondisi sarana dan prasarana kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan masih bisa dikatakan belum memadai warga binaan yang sakit harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, menurut Undang-Undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, kesehatan adalah tercapainya kesadaran, kemampuan dan kemauan 5 hidup sehat setiap penduduk agar dapat mewujudkan hidup sehat yang optimal, berarti setiap orang tanpa memandang ras, agama, politik yang dianut, dan ekonomi, diberikan hak pelayanan kesehatan demikian pula bagi narapidana yang sedang menjalani masa pidananya di LAPAS. Pelayanan kesehatan yang diberikan di LAPAS merupakan salah satu pemberian Hak Asasi Manusia. Oleh karena itulah kiranya perlu dikaji kembali bagaimanakah proses pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana dalam tinjauan undang-undang dan dalam pengambilan objek penelitian penulis akan mengambil data penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemenuhan hak kesehatan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan?
2. Bagaimana konsep pembinaan yang baik atas hak kesehatan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan?

B. Metodologi Penelitian

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis empiris, yaitu dengan mengutamakan penelitian studi kepustakaan untuk memperoleh bahan pustaka sebagai data dasar, dan didukung dengan penelitian lapangan melalui wawancara dan pengambilan pendapat dari berbagai diskusi dengan pihak-pihak yang peneliti anggap memiliki pengetahuan yang mendalam berkaitan dengan judul penelitian ini. Digunakan metode penelitian yuridis normative dan yuridis empiris. Karena masalah yang diteliti berkaitan dengan :

1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dengan dilaksanakannya penerapan peraturan sebagai bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak kesehatan.
2. Pendekatan tujuan pemidanaan dan pemberian hak warga binaan. yaitu menelaah dan mengkaji, kemudian menganalisis kasus pelanggaran hak warga binaan.
3. Penelitian empiris, yaitu dengan melihat kondisi yang sesungguhnya dilapangan bagaimana praktik hukum yang terjadi melalui observasi (pengamatan) maupun wawancara.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pemenuhan Hak Kesehatan Wargabinaan Lapas Banceuy Bandung

Dengan melaksanakan hak kesehatan wargabinaan, LAPAS Kelas II-A Banceuy Bandung menyediakan sarana dan prasarana kesehatan berupa 1 klinik dan 1 ruang inap beserta sejumlah fasilitas lainnya, seperti obat-obatan (obat batuk, pilek, demam, gatal-gatal dan lain-lain), nebulizer, resusitasi, tensimeter, ranjang besi, matras, meja perawatan, dll. Berdasarkan keterangan orang informan Lapas Kelas II-A Banceuy Bandung, sarana dan prasarana kesehatan di Lapas Kelas II-A Banceuy Bandung beberapa bagian sudah cukup. Tetapi masih terdapat beberapa kekurangan dan perlunya penambahan tenaga medis, Lapas Kelas II-A Banceuy Bandung Perlu menambah 1 Unit mobil ambulance untuk transportasi wargabinaan apabila perlunya perawatan medis diluar lingkup Lapas Kelas II-A Banceuy Bandung yang memerlukan

perawatan tambahan selain dirawat didalam Lapas Kelas II-A Banceuy Bandung ruang rawat inap atau kamar perawatan untuk wargabinaan perlu ditambah , alat bedah minor, tirai penyekat ruang rawat inap, matras, tabung oksigen.

Selanjutnya berdasarkan keterangan informan Lapas Kelas II-A Banceuy Bandung terdapat kendala diluar Ketika menangani atau memfasilitasi Kesehatan diluar Lapas Kelas II-A Banceuy Bandung dengan BPJS dimana banyak wargabinaan yang belum mempunyai atau mengurus BPJS dan baru dibuat ketika mendapati kesakitan dan perlunya perawatan keluar namun belum memiliki BPJS hal ini sedikit menyulitkan petugas.

Lapas Kelas II-A Banceuy Bandung menyediakan petugas Medis yang berjumlah 3 orang, terdiri dari 1 dokter gigi dan 2 dokter umum serta dibantu petugas para medis berjumlah 3 orang petugas medis Lapas Kelas II-A Banceuy Bandung melayani setiap saat dan kapanpun selama petugas medis tersebut dibutuhkan, baik itu diluar jam kerja. Dalam satu bulan kurang lebih terdapat 20-30 warga binaan yang sakit, dimana wargabinaan sering merasakan sakit diantaranya sakit batuk, pilek, sakit perut, gatal-gatal dan demam. Selama ini wargabinaan dari Lapas Kelas II-A Banceuy Bandung beberapa diantara mereka menderita penyakit khusus yaitu jantung, ginjal, tulang,, TBC dan lain-lain. Perlakuan terhadap wargabinaan akan dilakukan awalnya di Lapas itu sendiri, jika tidak ada perbaikan selama perawatan di Lapas Kelas II-A Banceuy Bandung maka wargabinaan akan dipindahkan ke Rumah Sakit, oleh karena itu wargabinaan dengan penyakit jantung dan tulang karena sakit. perawatan lebih lanjut di rumah sakit. Wargabinaan yang akan dikirim untuk perawatan lebih lanjut tentunya harus melalui beberapa tahapan proses yang diakhiri dengan persetujuan Kepala Lapas Kelas II-A Banceuy Bandung.

Warga binaan yang dibawa kerumah sakit akan di informasikan dan dikabarkan kepada pihak keluarga oleh pihak Lapas Kelas II-A Banceuy Bandung. Biaya pengobatan bagi narapidana diluar Lapas Kelas II-A Banceuy Bandung diserahkan kepada pihak keluarga warga binaan dengan memfungsikan kartu BPJS, apabila warga binaan belum memiliki kartu BPJS maka pihak Lapas Kelas II-A Banceuy Bandung akan membantu membuatkan kartu tersebut. Lapas Kelas II-A Banceuy Bandung menyediakan perawatan jasmani dengan melakukan kegiatan olahraga seperti senam yang wajib dilakukan oleh wargabinaan setiap pagi, bulu tangkis, volley, pingpong dan lainnya. Dalam menjaga kesehatan tubuh wargabinaan, Lapas Kelas IIA Banceuy Bandung memberikan beberapa kegiatan agar terjaga kesehatan jasmani. Perawatan jasmani yang diberikan oleh Lapas Kelas IIA Banceuy Bandung terhadap wargabinaannya, Pertama kegiatan olahraga untuk wargabinaan di Lapas Kelas IIA Banceuy Bandung diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan olahraga. Kegiatan olahraga yang wajib diikuti oleh wargabinaan yakni senam, yang diadakan setiap pagi hari. Bagi narapidana yang sedang menjalani masa karantina COVID-19 (Corona Virus Disease 19) tetap dapat mengikuti kegiatan senam, namun dijadwalkan pada hari senin dan kamis. Kegiatan senam dilaksanakan terlebih dahulu oleh wargabinaan yang sedang menjalani masa karantina kemudian bergantian dengan wargabinaan yang tidak menjalani masa karantina COVID-19 (Corona Virus Disease 19). Kedua Selain kegiatan senam, Lapas Kelas IIA Banceuy Bandung juga menyediakan kegiatan olahraga lainnya seperti bulutangkis, volly, takrau dan lainnya. Bagi wargabinaan yang memang bukan jadwal kamarnya untuk mengikuti senam dapat mengikuti kegiatan olahraga lainnya. Wargabinaan diberi kebebasan untuk melakukan olahraga apapun sesuai jadwalnya, bahkan kegiatan olahraga sangatlah dianjurkan untuk meningkatkan kualitas daya tahan tubuh. Perawatan Jasmani lainnya yaitu rekreasi atau hiburan berupa nonton tv, siaran radio dan video call yang dapat dilakukan sebagai pengganti kunjungan oleh keluarga wargabinaan selama masa Pandemi COVID-19. Tetapi meskipun tidak dapat dikunjungi oleh keluarga wargabinaan penitipan barang seperti uang, pakaian dan makanan dapat dilakukan melalui petugas jaga.

Demi tetap terjaganya Kesehatan psikis Lapas Kelas IIA Banceuy Bandung juga memberikan Fasilitas rekreasi atau hiburan yang disediakan oleh Lapas Kelas IIA Banceuy Bandung diantaranya penayangan televisi, yang digunakan untuk menonton acara atau berita-berita terbaru yang sedang berkembang saat ini dan tentunya penayangan televisi dibatasi pada jam-jam tertentu. Dengan adanya penyiaran radio, wargabinaan dapat kirim-kirim salam kepada sanak keluarga atau teman yang berada di rumah. Selain penayangan televisi dan penyiaran

radio, Lapas Kelas IIA Banceuy Bandung juga menyediakan layanan video call sebagai pengganti besuk atau kunjungan keluarga selama pandemi COVID-19, karena adanya COVID-19 (Corona Virus Disease 19) kunjungan keluarga atau besuk belum dapat dilaksanakan. Namun, pos kunjungan tetap menerima penitipan barang seperti makanan, pakaian dan uang dari keluarga wargabinaan. Saat ini layanan video call dan kirim-kirim salam melalui radio merupakan rekreasi/hiburan sekaligus cara komunikasi wargabinaan kepada sanak keluarganya selama masa pandemi COVID-19. Saat ini wargabinaan LAPAS Kelas II-A Banceuy Bandung telah divaksin demi mencegah penularan COVID-19 diruanglingkup wargabinaan LAPAS Kelas II-A Banceuy Bandung dengan menggunakan Vaksin Pfizer.

Konsep Pembinaan Yang Baik Atas Hak Kesehatan Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Pembinaan yang baik bagi wargabinaan yaitu dengan mengingat hak asasi manusia sebagai hak yang bersifat mendasar pada setiap insan manusia dan melekat pada diri seseorang, siapapun berhak memiliki hak dasar tersebut, termasuk wargabinaan yang mana wargabinaan juga termasuk manusia yang memiliki hak. Adanya hak ini menjelaskan bahwa manusia memiliki keistimewaan dimana keistimewaan ini tidak dapat terbebas dari adanya suatu kewajiban bagi seseorang untuk memenuhi keistimewaan yang ada pada diri orang lain maupun kewajiban yang ada pada diri pihak pendukung hak asasi tersebut. Dalam hal pengaturan hak dasar manusia pada warga binaan yang tidak dapat dikurangi dan bahkan negara tidak dapat berbuat sewenang-wenang pada hak dasar manusia, terkait pengaturan tersebut tertuang pada perlindungan hak wargabinaan diatur pada Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat 1.

Hak dasar manusia pada warga binaan diatur sebagaimana undang-undang diatas merupakan bagian hak yang dimiliki tiap manusia, tidak dapat seorangpun mengambilnya termasuk negara sekalipun. Terdapat pada pasal 14 ayat 1 huruf d berbunyi bahwa wargabinaan berhak “Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak”.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan telah mengatur sedemikian rupa agar proses menjaga dan memenuhi hak wargabinaan tetap terjaga, dalam hal menjaga Kesehatan jasmani wargabinaan juga diatur pada pasal 7 ayat 1 PP No. 32 Tahun 1999 menerangkan “setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan perawatan jasmani berupa pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi, pemberian perlengkapan pakaian, pemberian perlengkapan tidur dan mandi”.

Fasilitas perawatan jasmani berupa kegiatan olahraga seperti senam, volley, bulu tangkis dan lainnya berbentuk olah badan agar tetap terjaga Kesehatan jasmani, sedangkan fasilitas rekreasi bagi warga binaan yaitu berupa penayangan televisi, pemberian perlengkapan pakaian, dapat mendengarkan siaran radio dan termasuk Video Call sebagai pengganti kunjungan keluarga. Selanjutnya kesehatan ini harus mengacu pada SMR (Standart Minimum Rules Of Treatments of Prisoners). Yakni aturan minimum standar perlakuan terhadap wargabinaan, diantaranya :

1. Hak Makan dan Minum
2. Hak Kesehatan dan Kebersihan diri
3. Hak Pakaian dan Perlengkapan Tidur
4. Hak Pelayanan Kesehatan
5. Hak Perawatan atas sakit
6. Hak Olahraga

Setiap orang yang dipenjarakan yang tidak dipekerjakan di lapangan harus melakukan gerak badan, sekurangnya sejam setiap harinya jika cuaca mendukung. Pemeriksaan kesehatan memang sudah dilakukan sebagaimana mestinya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan berdasarkan undang-undang yang berlaku, namun dalam segi hal tenaga kesehatan Lapas Kelas II-A Banceuy Bandung belum menyediakan secara optimal tenaga kesehatan seperti yang tertuang pada Permenkumham No. M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kemenkumhan.

Pengaturan syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terkait pengaturan kesehatan wargabinaan diatur dalam pasal :

1. Pasal 14
 - a. Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
 - b. Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.
2. Pasal 15
 - a. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter LAPAS
 - b. Dalam hal dokter sebagaimana ayat 1 berhalangan, maka pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya.
3. Pasal 16
 - a. Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan dan dicatat dalam kartu Kesehatan
 - b. Dalam hal narapidana atau anak didik pemasyarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di LAPAS wajib melakukan pemeriksaan
 - c. Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus.
4. Pasal 17
 - a. Dalam hal penderita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 3 memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah di luar LAPAS.
 - b. Pelayanan kesehatan bagi penderita di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus mendapat izin tertulis dari Kepala LAPAS.
 - c. Penderita sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 yang dibawa dan dirawat di rumah sakit wajib dikawal oleh petugas LAPAS dan bila diperlukan dapat meminta bantuan petugas kepolisian.
 - d. Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit bagi penderita dibebankan kepada negara.
 - e. Dalam hal ada narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang sakit, maka Kepala LAPAS harus segera memberitahukan kepada keluarganya.
5. Pasal 21

Kepala LAPAS bertanggungjawab atas pengelolaan makanan, yang meliputi:

 - a. Pengadaan, penyimpanan, dan penyiapan makanan;
 - b. Kebersihan makanan dan dipenuhinya syarat-syarat kesehatan dan gizi;
 - c. Pemeliharaan peralatan masak, makan dan minum.
6. Pasal 22
 - a. Setiap narapidana atau anak didik pemasyarakatan dapat menerima makanan dari luar LAPAS setelah mendapat izin Kepala LAPAS.
 - b. Makanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sebelum diserahkan kepada narapidana atau anak didik pemasyarakatan, harus diperiksa terlebih dahulu oleh petugas LAPAS.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut :

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Baceuy Bandung dalam proses pemenuhan hak kesehatan masih terdapat kekurangan, hal ini mempengaruhi proses pemenuhan hak

kesehatan bagi wargabinaan sehingga belum optimalnya pemenuhan hak kesehatan bagi warga binaan karena disebabkan oleh jumlah tenaga medis yang tidak sesuai dengan ketentuan pada peraturan Menteri Hukum dan Ham dalam tataran pelaksanaan, dan juga terkait alat fasilitas masih adanya kekurangan, diantaranya tirai pemisah diruang rawat inap, tabung oksigen pada ruangan rawat inap dan dengan jumlah masih kurangnya 1 unit mobil ambulance karena jumlah penghuni Lapas sendiri 917 orang dari seharusnya 913 orang. Namun Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Banceuy Bandung telah mengupayakan semaksimal mungkin dengan sesuai kemampuan dari petugas yang bertugas di Lapas Banceuy tersebut.

2. Konsep yang baik dalam pemenuhan hak atas kesehatan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Banceuy Bandung yaitu dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan sedemikian rupa agar dalam pelaksanaan pembinaan wargabinaan dengan tujuan reintegrasi dimasyarakat tersebut dapat tercapai apa yang dicita-citakan oleh peraturan perundang-undangan itu, karena Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Banceuy Bandung telah memberikan pelayanan kesehatan, pemberian perawatan jasmani, menjaga kebersihan, memberikan fasilitas hiburan seperti televisi, radio hingga video call agar warga binaan terhindar dari depresi berat. Hal ini sesuai dengan semangat pembinaan warga binaan agar dapat menyesuaikan Kembali kepada lingkungannya disekitar terutama lingkungan masyarakat guna melindungi dan memelihara jiwa warga binaan maka dilakukanlah kegiatan sedemikian rupa. Menurut Undang Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Praturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang. Syarat Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan serta Perturan Menteri Hukum dan Ham Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Acknowledge

Terimakasih dan hormat penulis pada kedua orang tua, Mama Misayuningsih dan Papa Adang Sungkawa, serta kepada Yukci Nur Annisa Lisa Umami dan Cek Ayu Fragita serta Rafasya Abrisyam yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan doa untuk penulis yang sedang berjuang untuk meraih cita-citanya dan menjadi kebanggaan orang tua. Penulis juga menyadari bahwa Penulisan Skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan berbagai pihak terutama pembimbing Bpk Chepi Ali Firman Zakaria S.H, M.Hum.

Daftar Pustaka

- [1] Anisatul Hikmah, "Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Narapidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Rutan Kelas I Tanjungpinang, Kepulauan Riau)", Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2021, Hlm. 12.
- [2] Dina Migi Ramadhani, "Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak untuk Narapidana Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lapas Kelas II A Karawang)", Jurnal Hukum, Vol 7, No 1, Prosiding Ilmu Hukum, 2021, Hlm. 2.
- [3] Hazairin, Tujuh Serangkai Tentang Hukum (Jakarta: PT. Tintamas, 1974), Hlm. 45.
- [4] Chepi Ali Firman Zakaria, dkk "Perumusan kebijakan pemberian remisi yang berorientasi pada kepentingan narapidana kasus korupsi dalam rangka pemenuhan hak-hak narapidana", Jurnal Hukum Internasional, Vol 7, No 1, 2021, Hlm. 09-112
- [5] Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm. 38.
- [6] LJ. van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013), Hlm. 10.
- [7] Majda El Muhtaj, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002, Cet. Ke 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), Hlm 43